

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Ubaedillah, (2015) *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta, Kencana,
- Akuntabilitas Kinerja Instansi (LKJI), Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe Tahun 2019, 2020.
- Ali, I. G., & Budartha, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang, SetaraPress.
- Adrian Sutedi. (2011), *Good Corporate Governance*. Jakarta, Sinar Grafika
- Asofa, B. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta.
- CST Kansil et.al. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta, Jala Permata Aksara.
- Dwiyanto, Agus et all. (2002), *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan, UGM
- Hadiwiyono, S. M. (2002). *Hukum pertanahan Indonesia*. Intelegensia Media.
- Hanitijo Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Hans Kelsen. (2006). *Teori Hukum Murni*. Bandung, Nuansa & Nusamedia.
- I Dewa Gede Atmadja, & Putu Budartha, I. N. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang, Setara Press.
- Joko Widodo, (2001), *Good Governance: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*. Surabaya, Insan Cendekiawan.
- Laporan Direktorat Aparatur Negara Kemeneteriaan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). (2010). *Manajemen Pengaduan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik*.
- Mardiasmo. (2009), *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta, Andi
- Moehleriono. (2014). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

- Lexy J. Moleong. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Ridwan, H. R. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Raba, Manggaukang. (2006), *Akuntabilitas Konsep Dan Implementasi*. Malang, Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Santoso. (2008), *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung, Refika Aditama
- SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, (2000), *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Bandung, CV. Mandar Maju.
-, (2009) *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Bandung, CV. Mandar Maju
-, (2010) *Reformasi Administrasi Publik Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang Baik)*. Cet. II, Bandung, PT. Refika Aditama,
- Soekidjo Notoatmojo. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Suharyono M Hadiwiyono. (2002). *Hukum pertanahan Indonesia*. Intelegensia Media.
- Sri Maulidiah, (2014), *Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*. Bandung, CV Indra Prahasta.

C. Jurnal Dan Website

- Asmawati, Prinsip *Good Governance* Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Online E-KTP Di Daerah (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin) , JPAP, Vol 8 No 2 ,2023

- Beta Anggela, dkk. Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Aparatur Pelayanan Publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, *JMPKP: Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik*, Vol 5 No 1, 2023
- Dailiati, S. (2017). Prinsip-Prinsip *Good Governance* Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*, 9(2), 45.
- Faissal Malik, & Abdulajid, S. (2023). Penerapan Prinsip *Good Governance* Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Instansi Pemerintah Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Dan Badan Pertanahan Nasional/ Tata Ruang Kota Ternate). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 11(3).
- Harapan Daerah. (2023). Pemerintah Lhokseumawe Raih Penghargaan Kemenpan-Rb. Diakses pada Tanggal 9 Desember 2023. <https://hariandaerah.com/pemerintah-lhokseumawe-raih-penghargaan-kemenpan-rb/>
- Noviyanto, A., et al. (2019). Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. *Jurnal Caraka Prabhu*, 3(1), 92.
- Pemerintah Aceh. (2023). Pemko Lhokseumawe Raih Penghargaan Ombudsman. Diakses pada Tanggal 9 Desember 2023. <https://www.acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintahan/pemko-lhokseumawe-raih-penghargaan-ombudsman>
- Pemerintahan Kota Lhokseumawe. (2023). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Diakses pada Tanggal 9 Desember 2023. <https://disdukcapil.lhokseumawekota.go.id/pages-prinsip-prinsip-penyelenggaraan-pelayananpublik.html>
- Pemerintah Kota Lhokseumawe. (2023). Visi dan Misi. Diakses pada Tanggal 9 Desember 2023. <https://www.lhokseumawekota.go.id/visimisi>
- Raihani. (2021). Pelayanan Publik Dalam Pembuatan E-KTP (Studi Kasus pada Dinas Catatan Sipil Kota Lhokseumawe). *Kajian Administrasi Negara: Riset Dan Pengabdian*, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional, 153.

- Riska Chyntia Dewi dan Suparno, (2022) Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik, *Jurnal Media Administrasi*, Vol. 7, No. 1,
- Rizky Hasan, (2022), Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap Kualitas Pelayanan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Siti Nurwasma, Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, 2021
- Shafira Zalsabilah Arifah. (2022). Strategi Penerapan *Good Governance* Pada Pemerintahan Kota Makassar. *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 2(2), 84.
- Supratman Tahir. (2022). Implementasi Prinsip *Good Governance* Terhadap Efektifitas Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. *DEMOKRASI : Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung*, 2(2).
- Titin Rohayatin, dkk. Faktor Penyebab Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Birokrasi Pemerintahan , *Jurnal Caraka Prabu*, Vol 01, No. 01, 2017
- Tomuka, S. (2013). Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli)." *Jurnal eksekutif*.

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor:63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun
Kota Lhokseumawe Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan